

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan revolusi dan transformasi yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin China utamanya dalam bidang ekonomi, telah mengantarkan China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke2 di dunia. Dimana perkembangan ekonomi tersebut telah mempengaruhi Politik Luar Negeri China.

Stigma negara isolasionis, kini sudah tidak disandang China berkat kebijakan Pemimpin China untuk lebih membuka diri pada tatanan pergaulan internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembukaan penawaran investasi asing dan sistem ekonomi pasar bebas yang dilakukan China.

Meskipun pembangunan ekonomi China tidak terlepas dari revolusi dan transformasi yang telah dilakukan, akan tetapi dilain sisi kebijakan tersebut juga menimbulkan efek negative bagi kondisi politik dan stabilitas domestic China itu sendiri. Dampak negative tersebut dapat tercermin dari banyaknya masalah-masalah yang muncul. Salah satu masalah domestic tersebut adalah ancaman "*Three Evils*" yang mencakup Separatisme, Terorisme dan Ekstrimisme.

Eksistensi “*Three Evils*” di Negara tersebut menjadi ancaman nyata bagi Pemerintah China setelah berbagai aksi separatis seperti Tibet, Taiwan dan Xinjiang dan aksi terorisme lainnya telah mengganggu stabilitas dan keutuhan wilayah territorial China. Dalam hal ini pemerintah China menyadari bahwa mereka tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah itu secara mandiri. Untuk itu China mencari solusi diluar kemampuan domestiknya untuk menghentikan eksistensi “*Three Evils*”.

Setelah ancaman “*Three Evils*” semakin membabi buta akhirnya China semakin meningkatkan usahanya untuk mencari solusi untuk menghentikan ancaman tersebut. Hingga akhirnya China memilih negara-negara Asia Tengah sebagai pihak yang sangat strategis yang dapat membantu China melawan “*Three Evils*”. Selain dari sisi letak geografis yang sangat berdekatan yakni berbatasan langsung sepanjang 7000km, negara-negara Asia Tengah juga mengalami permasalahan domestic yang hampir sama. Kenampakan ancaman “*Three Evils*” di kawasan AsiaTengah dapat dilihat dari adanya gerakan separatisme gerakan Hizbut Tahrir di Kazazktan dan IMU (*Islamic Movement Uzbekistan*).

Menyadari hal tersebut, kedua belah pihak yakni China dan negara-negara Asia Tengah sepakat untuk menjalin kerjasama utamanya dalam hal keamanan dalam kerangka kerjasama organisasi internasional *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang merupakan organisasi regionalisme yang beranggotakan Rusia, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyztan, dan

Tajikistan. Organisasi ini resmi terbentuk pada 15 Juni 2001. Negara-negara anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) tidak pernah luput dari ancaman pertahanan dan keamanan pada penyelenggaraan pemerintahannya, berupa tindak separatisme, terorisme, serta ekstremisme yang melanda sepanjang area perbatasan negara-negara anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) yang saling berbatasan langsung sepanjang 7000 kilometer.

Dalam perkembangannya, hubungan kerjasama ini telah meluas ke bidang ekonomi dan politik antar negara SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). China lebih mengutamakan SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) sebagai salah satu cara untuk mempermudah kerjasama Ekonominya antara China dengan negara-negara Anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). China menyadari adanya keuntungan-keuntungan secara geopolitik akibat hubungannya antara negara-negara Asia Tengah melalui SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). Dari dominasi China di dalam SCO, China dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia tengah lainnya. Sebagai contoh Kerjasama dalam bidang Energi yang sangat dibutuhkan China. Beberapa negara Asia Tengah merupakan Pengekspor dan sebagai jalur Migas yang berasal dari timur tengah yang mempermudah China dalam mengamankan Pasokan Energinya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan:

“Mengapa China menjadikan kawasan Asia Tengah sebagai bagian dari SCO (*Shanghai Cooperation Organization*)?”

C. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menganalisa fenomena di atas adalah dengan menggunakan sebuah teori yang relevan dengan fakta dan data yang ada. Teori merupakan seperangkat hubungan antar konsep yang sistematis sehingga membentuk suatu rangkaian hubungan yang *comprehensive* untuk memaparkan, menjelaskan, dan memprediksikan suatu gejala sosial. Sedangkan konsep merupakan abstraksi tingkat pertama terhadap fakta atau realita.

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat

pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional itu.

Tujuan dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melangsungkan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, amupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi dalam arti yang kedua ini, organisasi internasional mengacu kearah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

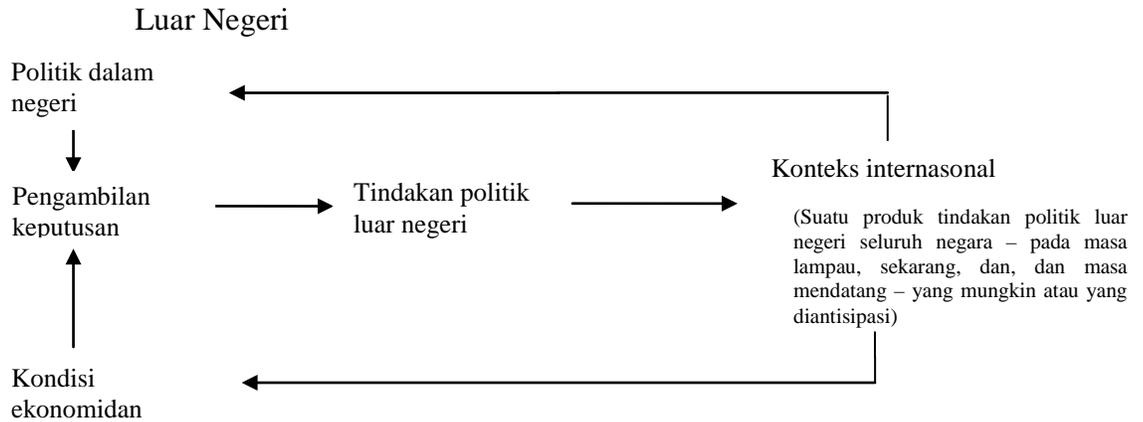
1. Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.¹

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan organisasi SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) dimana negara-negara di Asia baik itu China, Asia Tengah maupun negara anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) lainnya bergabung dengan tujuan untuk mengkoordinasikan segala kegiatan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kebudayaan. Selain itu adapun peran dalam organisasi SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) adalah sebagai arena yaitu tempat dimana para anggota-anggotanya berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang tengah dihadapi. Misalnya masalah separatism, ekstrimisme, terorisme, dll.

2. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

¹ Perwita, Anak Agung Banyu, Yani, Yanyan Mochamad, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011

Gambar 1.1. Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik



Dari gambar diatas menjelaskan bahwa Suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa aspek yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to Internasional Politics*.

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau

menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri. Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang vakum. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.² Tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Situasi domestik politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek

² Coplin, William D; Marbun; Mercedes, "Pengantar Politik Internasional", Sinar Baru Bandung; Bandung, 2003, hal 30

politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan kepribadian pengambil keputusan atau struktur konsep internasional faktor-faktor lain itu.

Situasi ekonomi dan militer domestik. Maksudnya adalah suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

Konteks internasional, ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.³

Dalam hal ini, Asia Tengah dijadikan sebagai buffer zone sebagaimana cara-cara pembendungan ideologi lawan pada masa Perang Dingin. Selain itu, fokus RRC di Asia tengah juga untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Soviet. Pada masa ini, jauh setelah Perang Dingin berakhir, logika hubungan internasional lebih mengarah dan mendominasi area ekonomi. Negara-negara Asia Tengah

³Decision making process Coplin,
https://www.academia.edu/3700867/Decission_making_proses_coplin_-_model_resume diakses pada 15 september 2015

merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, negara-negara Asia Tengah juga merupakan “jembatan” yang utama bagi pasokan minyak RRC dari lumbung minyak Timur Tengah.

Tindakan tersebut dilakukan oleh China mengingat Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis di dunia. Asia Tengah merupakan penghubung antara Asia Timur dan Timur Tengah yang kaya akan hasil alam dan energi. Karena itu Asia Tengah merupakan jalur minyak potensial bagi kawasan disekitarnya. Kawasan Asia Tengah terdiri dari lima negara, yaitu Turkmenistan Kazakhstan Kyrgyzan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Masing-masing nama negara mencerminkan nama suku yang mendiaminya.

Disisi lain, Asia Tengah merupakan jembatan antara kawasan Eastern dan Western. Berbatasan langsung dengan RRC di sebelah barat, Asia Tengah merupakan bekas negara raksasa Uni Soviet yang hancur pada dekade awal 90-an. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka dengan hampir secara bersamaan, Asia Tengah menjadi sekumpulan negara-negara baru yang berusaha mempromosikan diri untuk menciptakan kerjasama dan hubungan internasional. Bagi RRC, hal ini merupakan sebuah keuntungan, mengingat Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan provinsi Xinjiang, secara sosial, budaya, dan politik memiliki pengaruh yang besar bagi provinsi tersebut. Bagi RRC kawasan Asia Tengah merupakan kawasan jalur sutra yang sejak beribu abad yang lalu

sudah menjadi jalur perdagangan ekonomi tradisional RRC dan sampai sekarang di era RRC modern pun kawasan ini masih merupakan jalur perdagangan yang penting. RRC memiliki jalur jalan tol di Kyrgistan yang langsung menuju berbagai akses perdagangan penting di kawasan tersebut. RRC juga memiliki kepentingan keamanan yang besar kawasan ini yang berbatasan langsung dengan bagian barat RRC, bahkan Provinsi Qinghai, wilayah otonomi Xinjiang dan Tibet merupakan kawasan yang berpenduduk Uyghur, Turk yang merupakan etnis utama Asia Tengah.

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka China berusaha mengayomi negara-negara di Asia Tengah untuk bergabung dan membangun kerjasama regional yaitu dengan membentuk SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). Dalam pengambilan keputusannya tersebut China terlihat mendominasi karena selain sebagai negara penggagas China juga merupakan negara yang terbilang maju yang mampu mengendalikan anggota lainnya.

3. Konsep Kepentingan Nasional

Interaksi merupakan inti dari Hubungan Internasional. Dibalik suatu lah yang berkuasa interaksi tentu ada kepentingan yang melatarbelakangi interaksi tersebut. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, juga memiliki kepentingan yang melatarbelakangi mereka dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain.

Kepentingan tersebut umumnya disebut dengan *national interest* atau kepentingan nasional. *Interest* merupakan salah satu dari esensi Hubungan Internasional disamping aktor dan *power*. Tidak ada definisi pasti mengenai kepentingan nasional. Namun pada intinya, konsep kepentingan nasional merujuk pada tujuan kesejahteraan pemerintah nasional pada tingkat internasional, seperti penjagaan kemerdekaan politik dan integritas territorial.

Tokoh yang menjelaskan konsep kepentingan nasional pertama kali yaitu Hans Morgenthau dengan pendekatan realisnya. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Pengertian kepentingan nasional dapat dijelaskan dalam dua aspek. Pertama, kepentingan nasional adalah kebaikan bersama bagi masyarakat. Definisi ini melihat masyarakat sebagai sebuah komunitas, dengan hubungan yang saling menghormati, menghargai, serta mengikat anggotanya secara bersama-sama. Dengan kata lain, kepentingan nasional pada aspek ini dilihat secara umum. Yaitu sebagai ungkapan untuk

kebaikan bersama bagi masyarakat. Kedua, kepentingan nasional merujuk pada prinsip berdiplomasi yang mengedepankan kebaikan bersama dari masyarakat dalam hubungannya dengan unit nasional lainnya sebagai tujuan akhir dari aksi diplomasi. Dalam hal ini kepentingan nasional merupakan tujuan negara yang ingin mempertahankan atau menambah kekuasaannya.⁴

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental penentu objektif dan akhir yang memandu para pengambil keputusan negara dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang membentuk kebutuhan yang paling penting dalam suatu negara. Ini termasuk pertahanan diri, kemandirian, integritas teritorial, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Karena tidak ada satu "kepentingan" mendominasi fungsi pembuatan kebijakan pemerintah, konsep mungkin lebih akurat, dalam bentuk jamak, sebagai kepentingan nasional. Ketika sebuah negara mendasarkan kebijakan luar negerinya hanya pada dasar kepentingan nasional dengan sedikit atau tidak ada perhatian untuk prinsip-prinsip moral secara umum, dapat digambarkan sebagai pengejaran realistik yang bertentangan dengan kebijakan idealis.

⁴Kepentingan nasional, "[http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101%20\(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional\)-Kepentingan%20Nasional.html](http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101%20(Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional)-Kepentingan%20Nasional.html) diakses pada 10 september 2015

Maknanya jika didefinisikan secara subjektif masing-masing lebih dari 130 negara dalam sistem ketatanegaraan kontemporer berinteraksi dengan negara lain seperti mengembangkan kebijakan dan menjalankan hubungan diplomatic untuk mengejar kepentingan nasionalnya

Ketika kepentingan mereka harmonis, negara sering bertindak dalam forum untuk memecahkan masalah bersama; ketika mereka melakukan konflik kepentingan, bagaimanapun itu, kompetisi, persaingan, ketegangan, ketakutan dan akhirnya, perang bisa terjadi. Teknik yang dikembangkan dalam sistem negara untuk mendamaikan konflik kepentingan nasional termasuk diplomasi, penyelesaian secara damai, hukum internasional, organisasi regional, dan institusi global, seperti PBB dan lembaga-lembaganya. Masalah utama dari pembuatan kebijakan luar negeri dan diplomasi adalah bahwa menerjemahkan kepentingan yang relatif samar dan umum suatu bangsa ke dasar, tujuan yang tepat dan sarana. Meskipun pengambil keputusan harus ideal dengan banyak variabel dalam lingkungan internasional, konsep kepentingan nasional biasanya tetap merupakan faktor yang paling konstan dan berfungsi sebagai tonggak bagi para pengambil keputusan dalam proses kebijakan.⁵

Dalam hal ini erat kaitannya China dengan negara-negara kawasan Asia Tengah yaitu dengan China memasukkan kepentingan nasionalnya

⁵Plano, Jack C; Olton, Roy, "The International Relations Dictionary", Holt; Rinehart and Winston INC, Kalamanzoo, Michigan, 1969

dengan membentuk kerjasama regional SCO (*Shanghai Cooperation Organization*). China juga mengutamakan SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) sebagai salah satu cara untuk mempermudah kerjasama ekonominya antara China dengan negara-negara anggota SCO (*Shanghai Cooperation Organization*).

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas serta juga mempertimbangkan dari kerangka dasar teori yang digunakan, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sementara bahwa China menjadikan kawasan Asia Tengah sebagai bagian dari SCO (*Shanghai Cooperation Organization*)” karena adanya kepentingan nasional yang hendak dicapai China kaitannya dengan mengikutsertakan negara-negara Asia Tengah dalam keanggotaan SCO, diantaranya:

1. Bidang keamanan kaitanya cooperation partnership untuk melawan eksistensi “*Three Evils*” dikawasan China dan Asia Tengah.
2. Bidang Ekonomi kaitanya dengan kebutuhan China akan keamanan pasokan energi dan kebutuhan pasar ekonomi China.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan metodologi yang sesuai dengan ranah ilmu hubungan internasional.
2. Memberikan kontribusi analisa kawasan Asia khususnya China dengan Asia Tengah dari sudut pandang yang berbeda.
3. Untuk mengetahui alasan China memilih Asia Tengah sebagai bagian dari SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) dalam menciptakan stabilitas ekonomi RRC.
4. Untuk menganalisa arti penting Asia Tengah bagi China.
5. Untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa dengan fakta dan data yang ada.
6. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas tentang politik luar negeri RRC di kawasan Asia Tengah dalam studi kasus pembentukan SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi RRC. Penulis melakukan penelian analisis dari tahun dibentuknya SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) yaitu di tahun 2001 sampai tahun 2015 ini dengan menekankan peristiwa-peristiwa yang terjadi didalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Metodologi Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan alasan China memilih kawasan Asia Tengah sebagai bagian dari SCO (*Shanghai Cooperation Organization*) dalam menciptakan stabilitas ekonomi RRC.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen, dan bahan dari internet. Data tentang pada penelitian ini didapatkan dari beberapa buku, jurnal, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs internet untuk melengkapi data yang penulis kumpulkan.

4. Teknik analisa data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas lebih lanjut lagi dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II Membahas Orientasi Politik Luar Negeri China yang mencakup Sejarah, Prinsip dan Tujuan Politik Luar Negeri China

Bab III Membahas Shanghai Cooperation Organization sebagai bentuk Politik Luar Negeri China

Bab IV Membahas Arti Penting Asia Tengah bagi China

Bab V Kesimpulan.